

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Disamping makanan dan tempat tinggal, pakaian merupakan kebutuhan utama yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap manusia. Selain digunakan untuk memproteksi tubuh dari lingkungan sekitar, cara seseorang berpakaian juga berperan sebagai sebuah alat semiotika atau alat komunikasi yang dapat diinterpretasikan melalui objek visual (non-verbal). Menurut kajian sosial yang dilakukan oleh Roland Barthes, *fashion* merupakan sebuah bentuk ideologi yang diisyaratkan melalui cara seseorang berpakaian (Barthes, 1967). Teori tersebut didukung oleh pernyataan Thomas yang mengartikan *fashion* sebagai sebuah bahasa isyarat yang secara non-verbal menginterpretasikan seorang individu maupun kelompok. Menurutnya, secara simbolis *fashion* mengekspresikan gaya unik, identitas, status sosial, dan afiliasi gender maupun kelompok yang ada pada diri seseorang (Thomas, 2005). Pewaris brand kenamaan Prada, Miuccia Prada, juga turut berpendapat sebagai berikut:

“What you wear is how you present yourself to the world, especially today when human contacts go so fast. Fashion is an instant language.”

*Fashion* merupakan istilah yang dapat dilihat dari sudut pandang multidimensional. Namun, secara umum *fashion* dipahami sebagai mode dalam konteks pakaian atau mode yang merupakan mekanisme umum, atau ideologi yang masih berhubungan dengan pakaian (Svendsen, 2006). Sementara itu, Kaiser berpendapat bahwa *fashion* merupakan suatu bentuk ekspresi diri pada waktu dan tempat tertentu dalam konteks yang spesifik dari pakaian, gaya hidup, aksesoris, gaya rambut, make up, postur tubuh, dan lain sebagainya (Kaiser, 2019). Sedangkan menurut Christopher et, al. (2004) *fashion* merupakan istilah yang sangat luas yang biasanya mencakup segala produk atau pasar yang memiliki elemen gaya yang cenderung berumur pendek. Kita dapat mendefinisikan pasar *fashion* dengan karakteristik sebagai berikut:

1. **Berumur pendek:** produknya seringkali tidak bertahan lama, didesain untuk mengikuti gaya yang sedang trendi pada momen tertentu. Oleh karena itu, waktu penjualannya cenderung sangat singkat dan bersifat musiman, dalam jangka waktu bulanan atau bahkan mingguan.
2. **Volatilitas tinggi:** permintaan bagi produk-produk ini tidak stabil dikarenakan pengaruh dari cuaca, film, atau bahkan artis pop dan pesepak bola.
3. **Prediktabilitas rendah:** karena volatilitas yang tinggi, keakurasian total permintaan dalam satu periode sangat sulit diprediksi.
4. **Impuls pembelian tinggi:** keputusan pembelian konsumen bagi produk *fashion* kebanyakan dibuat saat sedang berbelanja. Dengan kata lain, konsumen akan terdorong untuk membeli suatu produk saat dihadapkan secara langsung dengan produk tersebut. Karena itu, untuk menarik minat konsumen para retailer harus secara konstan menghadirkan produk-produk baru dengan memperbanyak jumlah 'musim' dengan meningkatkan frekuensi perubahan seluruh produk di toko.

Jika dilihat dari aspek sosiologi, *fashion* merupakan sebuah bentuk imitasi dan penyetaraan sosial. Namun, secara paradoks *fashion* berbeda dari waktu ke waktu dan dari strata sosial satu dengan yang lainnya, menyatukan kelas-kelas sosial dan memisahkannya dari kelas lainnya. Kalangan elit biasanya akan memulai sebuah mode dan masyarakat biasa akan menirukan mereka dengan upaya menghapuskan perbedaan kelas. Namun jika mode terbaru sudah muncul, kaum elit akan meninggalkan mode tersebut dan beralih ke mode yang baru. Karena *fashion* diadopsi dari susunan sosial yang menuntut kesamaan imitasi dari anggotanya, tiap-tiap individu di dalam masyarakat secara otomatis tidak perlu dipusingkan dengan tanggungjawab etikal dan estetika *fashion* mereka. Mereka hanya perlu terlihat seragam dengan anggota masyarakat lainnya untuk dapat diterima di dalam kelas-kelas di mana mereka berada, karena itulah produk *fashion* diproduksi secara massal. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara

sosiologi, *fashion* hanyalah sebuah produk dari tuntutan sosial, walaupun objek individual yang diciptakan atau dicipta ulang mungkin tidak merepresentasikan individu tersebut secara aktual (Simmel, 1957).

Seperti yang telah disebutkan secara singkat di atas, *fashion* juga memiliki fungsi sebagai alat komunikasi (semiotika) non-verbal. Dengan kata lain, *fashion* dapat diartikan sebagai bahasa yang mampu mengekspresikan individualitas seseorang dalam bentuk non-verbal (Khandual dan Pradhan, 2018). Menurut Todorovic et al. (2014), beberapa fungsi *fashion* sebagai alat komunikasi antara lain:

- 1. Simbol kebudayaan:** Simbolisme dapat menentukan kepribadian seseorang dan apa yang dikenakan dalam lingkungan sosial dan kultural yang lebih luas. Cara dominan berpakaian merefleksikan tren kebudayaan masa kini serta standar nilai dan estetika yang tengah berkembang di dalam suatu kebudayaan.
- 2. Simbol kode:** Jika kita melihat pakaian sebagai sebuah kode, kita dapat mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kategori. Bukan hanya tujuan dan fungsi dari pakaian tersebut, tetapi kekayaan simbol yang harus diketahui. Memandang pakaian dengan cara ini memungkinkan kita untuk membedakan pakaian sehari-hari, festival, ritual, seragam, maupun kostum. Semua kategori tersebut memiliki makna khusus yang merepresentasikan nilai simbolis.
- 3. Simbol afiliasi subkultural:** Hingga awal abad ke-20, status sosial atau profesional seseorang sangat mudah diketahui karena pada saat itu terdapat perbedaan diantara pakaian untuk aktivitas sehari-hari dan pakaian formal. Namun kini, gaya berpakaian masyarakat sangat bervariasi mulai dari gaya klasik, sporty, punk, hip-hop, etnik, dan sebagainya. Ekspresi modern dalam berpakaian selalu ditemukan dalam kelompok subkultural yang memberikan kesempatan bagi kita untuk memahami cara menginterpretasikan pakaian atau simbol visual dalam aspek komunikasi dan simbolis.

Cara berpakaian seseorang sendiri telah lama digunakan sebagai salah satu indikator dari status sosial dan kekayaan seseorang. Misalnya saja pakaian

seorang bangsawan dan rakyat biasa, keduanya tentu berbeda dari segi desain maupun materialnya. Masyarakat Romawi Kuno bahkan memiliki beberapa peraturan dalam *Sumptuary Laws* (Hukum Barang Mewah) yang mengatur tentang warna dan tipe pakaian yang boleh dipakai oleh masing-masing kelas sosial. Mereka juga memiliki regulasi tak tertulis yang berkaitan dengan panjang dan perbedaan model jubah untuk tiap acara yang berbeda (Batterberry, 1977). Sementara itu, berbeda dengan masa sekarang, pada zaman dahulu pakaian cenderung lebih berfungsi sebagai simbol kebudayaan daripada sebuah selera personal. Hal tersebut mulai berevolusi dari tahun 1770 hingga saat ini (Tariq, 2022).

Perkembangan industri *fashion* yang begitu pesat tidak jauh dari peran industrialisasi yang membawa perubahan besar bagi peradaban manusia. Berkat adanya industrialisasi, mesin tenun yang membantu kegiatan produksi industri *fashion* dapat tercipta dan menyebabkan industri ini mengalami peningkatan yang signifikan. Tekstil sendiri merupakan industri yang dominan pada masa awal. Revolusi Industri dalam aspek tenaga kerja, nilai produk, dan modal yang diinvestasikan karena industri tekstil merupakan industri pertama yang menggunakan metode produksi modern. (Landes, 1969). Industri pakaian dan tekstil adalah industri yang relatif membutuhkan pekerja berkemampuan lebih rendah daripada industri pada sektor lain seperti otomotif atau elektronik. Ada beberapa faktor pembeda antara sektor tekstil dan pakaian. Industri pakaian cenderung lebih membutuhkan tenaga kerja daripada pengetahuan. Selain itu, industri ini membutuhkan level yang lebih rendah dalam modal dan biaya pemeliharaan daripada sektor tekstil. Meskipun begitu, kedua sektor ini memiliki interdependensi yang sangat kuat sampai sekarang (Murat et al, 2019).

Sebelum Revolusi Industri, masyarakat memiliki komunitas tersendiri untuk membuat pakaian mereka. Selain menjahit pakaian mereka sendiri, ada pula jasa untuk memperbaiki segala pakaian yang rusak atau sobek. Karena itu, setiap orang hanya memiliki beberapa pakaian dan setiap pakaian digunakan dalam intensitas yang tinggi pada saat itu. Tidak banyak bisnis pakaian karena pakaian membutuhkan waktu yang lama untuk diproduksi, selain itu masyarakat juga

bisa membuat pakaiannya sendiri. Namun, begitu Revolusi Industri dimulai, penemuan-penemuan baru bermunculan sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan semakin banyak. Karena pabrik-pabrik memiliki mesin baru yang menenun dan memproduksi kapas dengan kecepatan lebih tinggi, mereka membutuhkan lebih banyak orang untuk mengatur kain, mengoperasikan mesin, dan memfasilitasi seluruh proses. Hal ini membawa peningkatan dalam bisnis dan mendorong orang meninggalkan rumah mereka untuk bekerja lebih sering (Perkins, 2013).

Perubahan tatanan sosial, politik, lingkungan, dan budaya yang mulai terjadi sejak Revolusi Industri pertama hingga saat ini masih bisa dirasakan dampak baik maupun buruknya secara global. Ketersediaan pakaian, sepatu, maupun peralatan rumah tangga yang diproduksi secara massal membuat segala kebutuhan menjadi lebih terjangkau sehingga masyarakat dapat mengalokasikan pendapatannya untuk ditabung dan meningkatkan kualitas hidup, bahkan status sosial di masyarakat. Ditemukannya alat-alat komunikasi serta transportasi juga menciptakan efisiensi tenaga kerja sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah dilakukan. Selain itu, pertumbuhan industri juga melahirkan tenaga kerja yang terspesialisasi. Namun, walaupun banyak membawa perubahan baik, industrialisasi juga menciptakan permasalahan baru. Akibat adanya industrialisasi, penduduk melakukan urbanisasi ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan di pabrik yang menimbulkan kepadatan dan kekumuhan di kota. Para buruh juga dipekerjakan dalam waktu yang tidak sesuai dengan upahnya. Selain itu, mesin-mesin pabrik yang kotor dan menimbulkan polusi membahayakan kesehatan para buruh dan juga lingkungan sekitarnya. Belum lagi adanya polusi air dan udara, berkurangnya keanekaragaman hayati, kerusakan habitat liar, bahkan pemanasan global (Rafferty, 2017)

Industri tekstil dan garmen sebagai salah satu industri tertua di dunia juga tentunya turut andil dalam kerusakan yang diakibatkan oleh industrialisasi. Menurut Dana Thomas (2019), sedari dulu industri *fashion* merupakan bisnis ‘kotor’ yang mengeksploitasi manusia dan lingkungan demi keuntungan berlipat-lipat. Dalam rantai produksinya, perbudakan, buruh anak, dan buruh penjara merupakan hal yang telah ada selama bertahun-tahun. Eksploitasi

tersebut diperburuk dengan munculnya strategi *offshore outsourcing* yang kini banyak dimanfaatkan dalam proses manufaktur berbagai komoditas, termasuk tekstil dan garmen. Sejak Revolusi Industri, perusahaan-perusahaan terus berinovasi untuk dapat memanfaatkan keunggulan kompetitif untuk meningkatkan pasar serta keuntungan mereka. Model dari sebagian besar perusahaan pada abad ke-20 adalah perusahaan yang dapat memiliki, mengelola, dan mengontrol langsung asetnya. Namun, pada tahun 1970-an dan 1980-an, struktur manajemen yang tidak efisien dalam model tersebut mengakibatkan persaingan global terhambat. Karena itu, untuk meningkatkan fleksibilitas dan kreativitas mereka, banyak perusahaan besar mengembangkan strategi baru dengan berfokus pada bisnis inti mereka dan mengalihdayakan pekerjaan lain yang tidak dapat dilakukan oleh tim internal. Hal tersebut mendorong lahirnya strategi *outsourcing* yang dikenal dan dimanfaatkan dengan luas hingga saat ini.

Dalam industri *fashion* sendiri, Amerika Serikat sebelumnya merupakan produsen dari 70% pakaian yang dibeli warganya hingga akhir tahun 1970an. Namun, sejak kemunculan bisnis *fast fashion* dan mulai populernya strategi *outsourcing* selang satu dekade kemudian, perusahaan-perusahaan *fashion* mulai memindahkan manufaktur mereka ke negara-negara berkembang untuk memangkas biaya operasional. Akibatnya, jutaan buruh pada akhirnya harus kehilangan pekerjaan mereka karena strategi *offshore outsourcing* tersebut. Meskipun membuka lapangan pekerjaan dan mendorong peningkatan ekonomi, hal ini tak serta merta menjadi angin segar bagi negara-negara berkembang. Karena pada kenyataannya, industri *fashion* mempekerjakan 1:6 orang di seluruh dunia, namun kurang dari 2% pekerja tersebut mendapatkan gaji yang layak. Selain itu, kebanyakan pekerja industri *fashion* adalah perempuan dan sebagian adalah anak-anak dibawah umur yang dipekerjakan melalui sistem *outsourcing*. Kondisi kerja di pabrik negara-negara berkembang juga sangat buruk, beberapa pabrik bahkan tidak layak beroperasi hingga terbakar ataupun runtuh (Thomas, 2019).

Sedangkan di sektor lingkungan, produksi garmen atau pakaian meningkat sebanyak dua kali lipat setiap tahunnya sejak tahun 2000 dan telah melampaui

100 miliar buah pada tahun 2014 (McKinsey & Ellen McArthur Foundation, 2016). Pada saat ini, produksi pakaian secara global berkisar antara 100-150 miliar per tahunnya (World Economic Forum, 2016). Penelitian lainnya menyatakan bahwa produksi serat tekstil global yang sebelumnya hanya berkisar pada 8,4 kilogram per individu pada tahun 1975 melonjak hingga 14 kilogram per individu pada tahun 2020 (Statista, 2019). Faktanya, harga yang murah meningkatkan pembelian. Karena itu, para konsumen kini lebih banyak membeli pakaian baru daripada mengenakannya dan terkadang membuangnya setelah hanya beberapa kali pakai. Akibatnya, menurut estimasi Circular Fibres Initiative dalam laporan Ellen MacArthur Foundation (2017), secara global penggunaan pakaian telah berkurang 36% daripada 15 tahun lalu dikarenakan kebiasaan yang dimiliki masyarakat di masa kini. Di Amerika Serikat, pakaian bahkan hanya digunakan seperempat dari rata-rata global, sementara di China, penggunaan pakaian berkurang 70% selama 15 tahun terakhir. Padahal untuk memproduksi pakaian-pakaian tersebut, sangat banyak sumber daya tak terbarukan yang digunakan. Dengan sistem produksi, distribusi, dan penggunaan pakaian saat ini yang berorientasi pada siklus ambil-pakai-buang, pakaian-pakaian tersebut kemudian dengan cepat akan berakhir di tempat pembuangan akhir atau pembakaran (Remy, Speelman, & Swartz, 2016).

Industri tekstil merupakan salah satu rantai industri terbesar dan tersulit dalam industri manufaktur (Srebrenkoska et al., 2014). Produksi tekstil memerlukan beberapa tahap proses mekanis yang membutuhkan banyak air untuk tahap pewarnaan, finishing, dan pencucian (Brik et al., 2006). Melalui proses tersebut, berbagai macam polutan dari semua tahap dalam pemrosesan serat, kain, serta produksi garmen terlepas dan mencemari limbah air, limbah padat, udara dan bahkan menyebabkan polusi suara. Hal yang menjadi perhatian dalam industri tekstil adalah jumlah air yang dibuang dan zat kimia yang terkandung didalamnya. Air digunakan untuk membersihkan bahan mentah dan untuk beberapa tahap pembilasan dalam keseluruhan proses produksi. Untuk memproduksi 1 kg tekstil perkiraan air yang digunakan adalah sebanyak 200 liter (Srebrenkoska et al., 2014). Sedangkan untuk membuat satu celana jeans

saja dibutuhkan 7,500 liter air yang setara dengan jumlah air yang diminum oleh satu individu dalam kurun waktu 7 tahun. Selain itu, menurut UNCTAD, industri *fashion* menggunakan sekitar 93 milyar kubik per meter air dan menghasilkan sekitar setengah juta ton mikrofiber yang dibuang ke lautan setiap tahunnya. (UN, 2019).

Di samping proses pencucian dan pembilasan, proses pewarnaan merupakan langkah yang tak kalah penting dalam pembuatan tekstil. Selama proses ini, warna ditambahkan ke serat, dan bahan kimia yang berbeda dapat digunakan untuk meningkatkan proses adsorpsi antara warna dan serat. Limbah dari pewarna dan bahan kimia yang digunakan dapat mencemari tanah, sedimen, dan air permukaan (Yaseen & Scholz, 2018). Limbah yang dibuang merupakan campuran zat warna, logam dan polutan lainnya. Karakteristik limbah tekstil sendiri bervariasi dan tergantung pada jenis tekstil yang diproduksi dan bahan kimia yang digunakan. Limbah-limbah tersebut mengandung sejumlah besar agen yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan kesehatan manusia termasuk padatan tersuspensi dan terlarut, *biological oxygen demand* (BOD), *chemical oxygen demand* (COD), bahan kimia, mengandung logam seperti kromium, arsenik, tembaga, seng dan zat pewarna (Srebrenkoska et al., 2014).

Selain pembuangan limbah tekstil, mikroplastik juga menjadi polutan yang menjadi sorotan dalam industri tekstil. Hampir seluruh aktivitas sehari-hari manusia melibatkan plastik yang mencemari lautan. Partikel kecil plastik yang tak terlihat berkontribusi hingga 30% dari 9,5 juta ton plastik yang mengambang di seluruh lautan. Dari proporsi mikroplastik yang ditemukan di lautan, sekitar dua pertiganya berasal dari ban kendaraan dan serat mikro yang terlepas dari pakaian saat dicuci. Selain itu debu kota, marka jalan, dan perahu di air juga berkontribusi terhadap masalah tersebut. Menurut Dirjen IUCN, Inger Andersen, seluruh polusi ini sangat berbahaya bagi keanekaragaman hayati laut dan juga kesehatan manusia. (IUCN, 2017). Mikroplastik sendiri merupakan partikel plastik dengan ukuran dibawah 5mm. Mikroplastik primer adalah plastik yang dilepas ke lingkungan dalam bentuk partikel kecil (gel mandi, butiran mikro, abrasi ban, dsb.) Sementara mikroplastik sekunder adalah mikroplastik yang

dihasilkan dari degradasi plastik yang lebih besar misalnya kantong plastik (Wit & Bigaud, 2019). Salah satu jenis mikroplastik yang umum ditemukan dalam sampel lingkungan adalah serat (fiber) yang diduga berasal dari tekstil. Baik serat tekstil alami (wol, linen, dan kapas) maupun serat tekstil sintesis (poliester, poliamida) ditemukan di lautan (Mathalon dan Hill 2014; Remy et al. 2015).

Serat mikroplastik dapat dihasilkan dari berbagai macam aktivitas seperti pembuatan tekstil, pemakaian garmen dan pembuangan akhir masa pakai. Seluruh proses produksi garmen, dari pembuatan serat hingga pembuatan garmen, dapat mempengaruhi kecenderungan luruhnya serat mikro dari produk akhir. Jenis kain tertentu, seperti poliester utuh melepaskan serat mikro dalam jumlah tertinggi selama 5-10 pencucian pertama, pra-pencucian dan penyaringan industri dapat menghasilkan serat mikro dalam jumlah besar bahkan sebelum produk dijual ke pasar. Selain dihasilkan dari proses produksi tekstil yang dilakukan oleh pabrik, mikroplastik juga dapat muncul akibat aktivitas domestik sesederhana mencuci dan menjemur pakaian. Menurut Boucher dan Friot, sekitar 35% mikroplastik yang dilepaskan ke lautan secara global berasal dari pencucian tekstil sintesis (Boucher dan Friot, 2017). Sedangkan di Eropa yang sebagian besar rumah penduduknya telah terhubung dengan sistem pengolahan limbah dan air limbah, diperkirakan menghasilkan 13.000 ton serat mikro tekstil, atau 25 gram per orang yang dilepaskan ke air permukaan setiap tahunnya, menyumbang 8% dari total pelepasan mikroplastik primer ke air (Eunomia dan ICF, 2018).

Mendukung pendapat Boucher dan Friot, para peneliti di International Marine Litter Research Unit di Plymouth University di Inggris telah menemukan bahwa mencuci pakaian yang terbuat dari serat sintesis menggunakan mesin cuci pada suhu normal menyebabkan banyak serat plastik mikro dilepaskan ke dalam air limbah. Jumlah serat plastik yang dilepaskan selama siklus pencucian pun tergantung pada kain serta jenis deterjenya. Beban pencucian 6 kilogram untuk produk-produk kain akrilik (seperti selimut berbulu) menghasilkan lebih dari 700.000 serat individual. Sementara muatan kain poliester (seperti sweater bulu domba) menghasilkan hampir 500.000 serat poliester, dan pakaian campuran

poliester-katun menghasilkan sekitar 140.000 serat. Panjang serat rata-rata berkisar antara 5 hingga sekitar 8 milimeter (Napper dan Thompson, 2016). Menurut Greenpeace, serat mikroplastik tidak menetap di satu permukaan tanah, sungai, laut, maupun udara, tetapi berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya karena proses alamiah (Revell, 2021). Karena itu, setelah terlepas, partikel-partikel mikroplastik dapat mengalir ke saluran pembuangan, sungai, laut, tanah maupun terbang ke udara dan mengontaminasi udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, dan air yang kita minum. Sumber terbesar dari proses konsumsi mikroplastik adalah air minum karena mikroplastik dapat ditemukan dalam berbagai sumber air (air tanah, air permukaan, air keran, dan air kemasan) di seluruh dunia. Sumber kedua adalah kerang, jika kerang dikonsumsi secara keseluruhan termasuk organ pencernaannya yang telah tercemar plastik, maka mikroplastik yang terkandung dalam kerang dapat tertelan sekitar 0,5 gram per minggunya. Sementara dalam sistem pernapasan, mikroplastik diperkirakan memasuki tubuh manusia dengan proporsinya bergantung pada lingkungan dan gaya hidup seseorang (Wit & Bigaud, 2019). Dalam tubuh manusia, mikroplastik ditemukan di jaringan paru-paru, feses, perut, dan aliran darah manusia, bahkan plasenta bayi yang belum lahir (Suran, 2018; Ragusa et al., 2021).

Berdasarkan penelitian dari University of Newcastle untuk WWF, rata-rata setiap orang diperkirakan dapat mencerna 5 gram plastik setiap minggunya. Ukuran tersebut setara dengan berat sebuah kartu kredit. Rata-rata orang berpotensi mengonsumsi sebanyak 1769 partikel plastik setiap minggu hanya melalui air, sedangkan vektor lainnya seperti kerang, bir, dan garam masing-masing menyumbang 182; 10; dan 11 partikel plastik (Wit & Bigaud, 2019). Namun menurut penelitian dari Macquarie University, Australia, anak-anak di bawah enam tahun menghirup sekitar tiga kali lebih banyak mikroplastik daripada rata-rata orang dewasa (Soltani et al., 2021). Mikroplastik dari tekstil (yaitu nilon dan poliester) telah ditemukan menghambat kemampuan paru-paru untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh Covid-19, serta dapat menghambat perkembangan jaringan paru-paru pada anak-anak. Studi tentang

mikroplastik yang berasal dari limbah sebagai vektor transmisi virus Sars-CoV-2 juga menemukan bahwa serat plastik yang terkontaminasi dari limbah bahkan dapat menyebabkan penularan Covid-19 melalui udara yang kita hirup (Liu dan Schauer, 2021).

Di samping polusi udara yang mengandung mikroplastik, emisi karbon yang dihasilkan industri *fashion* juga bertanggung jawab atas 10% emisi karbon tahunan global, melebihi gabungan seluruh penerbangan dan pelayaran laut internasional (UN, 2019). Sebagian besar proses yang dilakukan di pabrik tekstil juga menghasilkan emisi atmosfer. Karena itu, dalam industri tekstil, emisi gas merupakan masalah polusi terbesar kedua setelah kualitas limbah (Mukherjee, 2015). Saat tekstil melalui proses produksi, polutan yang mencemari udara dihasilkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Boiler pabrik yang memanaskan air melepaskan oksida nitrat dan sulfur dioksida, karbon monoksida dilepaskan dari operasi sizing pabrik, proses *bleaching* melepaskan klorin dioksida, dan pencetakan kain melepaskan hidrokarbon dan amonia. Sedangkan proses finishing kain dapat melepaskan formaldehida ke udara. Tanpa perlindungan sesuai dengan standar EPA, uap beracun ini akan tetap melayang di udara, terbawa angin dan mencemari area lain. Selain proses produksi, proses distribusi *fast fashion* juga memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan emisi karbon. Sedangkan kunci dari strategi responsivitas bisnis *fast fashion* adalah *lead time*, dan respons yang cepat membutuhkan *lead time* yang singkat. Dengan begitu perusahaan harus memilih moda transportasi yang efisien karena transportasi industri *fashion* yang menimbulkan emisi karbon tidak dapat dihindari (Shen, 2014).

Untuk mengatasi polusi yang dihasilkan oleh berbagai sektor termasuk industri tekstil, Environmental Protection Agency (EPA) mengembangkan hierarki pengelolaan limbah empat tingkat untuk memandu pengambilan keputusan pengelolaan limbah dengan tujuan mengurangi jumlah sampah sekali pakai dan melestarikan ruang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terbatas. Hierarki tersebut mengurutkan berbagai strategi pengelolaan limbah mulai dari yang paling dianjurkan hingga yang paling tak dianjurkan dan menekankan pada

pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pengomposan sebagai kunci untuk pengelolaan bahan yang berkelanjutan. Strategi-strategi ini diharapkan mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim (EPA, 2021; EPA, 2022). Meskipun cara pembuangan sampah ke TPA merupakan pilihan yang paling tidak dianjurkan dalam pengolahan limbah, sebagian besar limbah nyatanya dikelola dengan cara tersebut. Secara global, tercatat bahwa 37% dari total sampah di seluruh dunia dibuang di TPA setiap tahunnya (Kaza et al., 2018). TPA sendiri merupakan sebuah tanah lapang yang dirancang dan dibangun sebagai tempat pembuangan akhir dari limbah padat (Abdel-Shafy & Mansour, 2018). Menurut laporan berjudul *Pulse of The Fashion Industry 2017* yang dibuat oleh Global Fashion Agenda & The Boston Consulting Group (2017), secara global 92 juta ton limbah tekstil berakhir di TPA setiap tahunnya. Dan angka tersebut diperkirakan akan bertambah setidaknya 50% pada tahun 2030. Sementara menurut penelitian EPA, sampah tekstil memenuhi 5% dari total area TPA yang ada di seluruh dunia.

Namun, sampah tekstil membutuhkan waktu yang tak sedikit untuk hancur. Limbah tekstil terdiri dari serat alami, serat sintetis, dan aksesoris seperti plastik dan potongan logam. Serat alami mungkin membutuhkan waktu berminggu-minggu atau bertahun-tahun untuk terurai tergantung pada sumber serat. Misalnya saja katun, katun adalah serat alami yang paling banyak digunakan di dunia di pasar tekstil. Kain yang terbuat dari katun membutuhkan waktu sekitar 5 bulan untuk terurai. Sementara itu, serat sintetis dalam limbah tekstil hampir tidak dapat terdegradasi. Kain sintetis seperti poliester, spandex, dan nilon membutuhkan waktu 30 hingga 40 tahun untuk rusak, dan mungkin perlu lebih dari 100 tahun untuk terurai sepenuhnya. Kain saat ini terbuat dari campuran serat di mana dua atau lebih serat tekstil digunakan. Campuran kapas dan poliester adalah material campuran yang paling banyak digunakan dalam bisnis tekstil dan garmen. Namun, rasio kapas terhadap poliester bervariasi. Hal itu menyebabkan tumpukan limbah tekstil yang sulit terdegradasi menumpuk di TPA. Penimbunan limbah tekstil yang tidak tepat tersebut berpotensi mencemari

air tanah dan menghasilkan emisi gas rumah kaca setelah dekomposisi (Nayak, 2019).

Selama beberapa puluh tahun terakhir, industri tekstil memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Bangladesh. Berdasarkan data statistik yang dipublikasikan oleh Bangladesh Bank dalam jangka waktu 2012-2021, sektor tekstil dan pakaian di Bangladesh memperoleh rata-rata FDI sekitar US\$382,5 juta dan secara konstan masuk ke dalam 5 sektor teratas dengan total FDI tertinggi. Jadi tak heran bila negara ini menjadi tuan rumah bagi lebih dari 4000 pabrik garmen yang beroperasi, dengan estimasi tenaga kerja yang mencapai lebih dari 4 juta orang. Menurut laporan Statista (2021), dalam 10 tahun terakhir saja sektor Ready Made Garment (RMG) telah menyumbangkan rata-rata sekitar 81% dari total komoditas ekspor yang diperdagangkan Bangladesh ke luar negeri dengan estimasi rata-rata pendapatan dalam jangka waktu yang sama sebesar US\$27,1 miliar. Meskipun begitu, pertumbuhan positif tersebut tidak berbanding lurus dengan kondisi lingkungan di sana. Karena menaungi ribuan pabrik tekstil yang bekerja sama dengan perusahaan multinasional, rakyat Bangladesh harus menerima kenyataan bahwa lingkungan mereka telah mengalami degradasi yang cukup signifikan akibat proses produksi tekstil besar-besaran yang telah dilakukan selama puluhan tahun. Sebagai negara manufaktur RMG kedua yang menjadi favorit negara-negara di dunia setelah China, kondisi ekologi Bangladesh tentunya tak dapat terhindar dari degradasi. Mulai dari limbah tekstil di perairan, polusi udara, serta penumpukan sampah tekstil di TPA merupakan dampak yang harus dibayar oleh Bangladesh untuk merasakan peningkatan ekonomi yang sebenarnya tidak sebanding dengan kerusakan lingkungannya.

Melalui penelitian ini, penulis mengindikasikan bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh pertumbuhan industri RMG tersebut secara tidak langsung berhubungan dengan kebijakan negara yang dipengaruhi secara kuat oleh neoliberalisme. Dengan pengaruh kebijakan neoliberal, negara-negara berkembang didorong untuk terus menyesuaikan diri untuk menciptakan iklim investasi yang ramah bagi para investor. Keberadaan iklim investasi yang baik

tersebut hanya bisa terjadi jika negara turun tangan dalam menciptakan regulasi yang mendukung kelancaran bisnis dengan negara-negara lain. Sektor Ready Made Garment (RMG) di negara-negara berkembang seperti China, Vietnam, dan Bangladesh sendiri mampu berkembang pesat karena pemberlakuan regulasi yang dipengaruhi oleh kebijakan neoliberal seperti liberalisasi, deregulasi, maupun privatisasi. Namun, demi memenuhi tuntutan rantai pasokan global, negara yang berada di bawah kekuatan neoliberal juga dapat melakukan segala cara termasuk menggunakan state violence untuk menekan perbedaan pendapat sekaligus merongrong hak-hak buruh dan kondisi kerja mereka (Banerjee, 2019). Karena itu, meskipun selama empat dekade terakhir neoliberal terbukti telah sangat berhasil dalam memperkuat transfer kekayaan dan kekuasaan dari publik ke swasta, dari miskin ke kaya dan dari tenaga kerja ke modal, dalam prosesnya, fase kapitalisme ini telah menyebabkan finansialisasi dan komodifikasi yang terlalu luas, serta ancaman perang dan kerusakan planet yang cukup intens (Ismail & Kamat, 2018).

Di Bangladesh sendiri, rangkaian kebijakan yang secara konstan mengalami kompromisasi telah memungkinkan terbukanya jalan bagi liberalisasi perdagangan negara tersebut sehingga terjadi peningkatan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun faktanya, kesejahteraan tersebut hanya bisa dirasakan kalangan tertentu dan justru mengorbankan lingkungan serta menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat yang lebih luas. Sebagai contoh, di perairan ibu kota Bangladesh, Dhaka, terdapat beberapa sungai yang hampir mati dan tiga sungai yang telah dinyatakan mati karena menjadi situs pembuangan limbah tekstil ilegal. Akibatnya, air sungai yang menjadi kebutuhan utama, seperti minum, mencuci pakaian, hingga irigasi, tidak lagi dapat dimanfaatkan karena telah tercemar dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Penurunan kualitas lingkungan akibat kegiatan manufaktur *fast fashion* tidak hanya terjadi di perairan saja, melainkan juga di tanah serta udara. Menurut riset Circular Fashion Partnership oleh Global Fashion Agenda (2019), industri tekstil dan RMG Bangladesh menghasilkan sekitar 577.000 ton limbah padat

setiap tahunnya, di mana sekitar 250,000 ton dari limbah tersebut berasal dari katun yang mudah terdegradasi dan dapat di daur ulang sepenuhnya. Dengan begitu, lebih dari setengah limbah padat tersebut berasal dari material yang sulit terdegradasi dan akan menyebabkan penumpukan limbah di TPA. Selain terjadinya penumpukan, limbah tekstil yang terdekomposisi juga dapat mengeluarkan gas metan yang menimbulkan efek rumah kaca. Gunung sampah tekstil sendiri tidak terjadi begitu parah di Bangladesh dan justru dapat ditemukan di Chile dan Ghana. Namun, bukan berarti keberadaan sampah tekstil di TPA tidak berakibat buruk pada lingkungan di Bangladesh. Menurut penelitian Reverse Resource (2017), volume sisa produksi garmen di China dan Bangladesh secara sistematis dilaporkan dengan jumlah yang lebih kecil daripada yang seharusnya. Mereka berpendapat demikian lantaran proses manufaktur kain yang paling efisien saja akan menghasilkan sisa produksi dengan besaran minimum 25%, sedangkan dalam beberapa kasus bisa mencapai 47%. Bahan-bahan sisa produksi tersebut kemudian dapat di daur ulang, namun sebagian besar dibakar atau dibuang ke TPA. Selain dapat melepaskan gas metan ke udara, sisa-sisa produksi kain yang berakhir di TPA juga dapat mengkontaminasi tanah dengan zat-zat beracun.

Sementara itu, polusi udara dalam industri tekstil sendiri terbagi dari dua penyebab yakni proses produksi dan distribusi. Dalam prosesnya, mesin-mesin yang digunakan dalam produksi tekstil seperti boiler, thermo pack, dan generator diesel melepaskan emisi gas ke udara. Polutan yang berasal dari emisi gas yang terlepas tersebut di antaranya mengandung *suspended particulate matter* (SPM), sulfur oksida, dan nitrogen oksida (Tiwari & Babel, 2013). Sedangkan dalam proses distribusinya, transportasi dalam proses ekspor menyebabkan tingginya emisi karbon di sepanjang jalur pengantaran. Sektor Ready Made Garment memanfaatkan transportasi jalur darat, laut, dan udara. Karena sektor ekspor RMG Bangladesh sangat besar, intensitas kegiatan jasa transportasi yang mengangkut barang-barang ekspor pun sangat tinggi hingga berakibat pada peningkatan emisi karbon yang mencemari udara di negara tersebut. Masalah ini akhirnya menjadi salah satu dari sekian banyak penyebab tingginya polusi udara

di ibukota Bangladesh, Dhaka, yang didapuk menjadi ibukota dengan polusi udara tertinggi di dunia pada tahun 2021.

Dalam bisnis *fast fashion*, meluasnya penggunaan strategi *outsourcing* yang lahir dari akumulasi sistem neoliberal dan berdampak negatif pada lingkungan mendorong penulis untuk mengangkat isu terkait degradasi lingkungan di Bangladesh yang menjadi salah satu produsen utama dari produk-produk *fast fashion*. LMICs seperti Bangladesh pada kenyataannya kerap menjadi pihak yang tidak diuntungkan dalam bisnis *fast fashion* karena jika dibandingkan dengan negara maju, mereka mendapatkan lebih banyak dampak negatif seperti peningkatan polusi dan limbah. Terlebih lagi, regulasi negara berkembang tentang lingkungan cenderung sangat sedikit bahkan tidak ada sama sekali meskipun populasi masyarakat sangat prihatin terhadap lingkungan (Netto et al, 2020). Jadi, tidak ada pakem yang dapat benar-benar melindungi tenaga kerja serta lingkungan yang ada di sana. Selain minimnya regulasi, adanya tekanan dari negara-negara maju membuat LMICs seperti Bangladesh semakin sulit bermanuver, belum lagi adanya kebutuhan akan lapangan pekerjaan di dalam negeri yang sulit terpenuhi jika tidak bekerja sama dengan pihak asing.

Untuk membantu proses penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian penulis tentang isu degradasi lingkungan di Bangladesh baik berupa buku, jurnal, maupun artikel akademis yang berguna sebagai acuan dasar yang mendukung argumen penulis dalam melakukan kegiatan penelitian mengenai dampak strategi *outsourcing* terhadap kerusakan lingkungan di Bangladesh. Menurut penelitian Rachel Bick, Erika Halsey, dan Christine Ekenga dalam publikasi jurnal **Environmental Health: The Global Environment Injustice of Fast fashion** yang diterbitkan pada tahun 2018, meskipun memberikan kesempatan bagi konsumen untuk membeli pakaian dengan harga yang terjangkau, keberadaan setiap garmen yang diproduksi oleh bisnis *fast fashion* secara signifikan berhubungan dengan risiko degradasi kesehatan manusia dan lingkungan disekitarnya. Mulai dari kultivasi katun yang menyebabkan terbuangnya begitu banyak air, pembuangan cat yang tidak diolah ke sumber mata air lokal, hingga rendahnya upah buruh dan kondisi

kerja yang buruk. Belum lagi semakin bertambahnya tumpukan limbah tekstil yang diakibatkan oleh tingginya konsumsi pakaian yang secara langsung berimbas kepada *low and middle-income countries* (LMICs) sebagai produsen utama dari industri *fashion* sekaligus resipien limbah tekstil ekspor. Karena itu, untuk memperbaiki ketidakadilan dari aspek lingkungan hingga tenaga kerja yang seakan-akan dilimpahkan kepada LMICs, tim penulis mengusulkan adanya restrukturisasi secara keseluruhan dalam penerapan bisnis *fashion* diantaranya adalah penggunaan material ramah lingkungan bagi barang-barang produksi, pemberian sertifikasi bagi perusahaan-perusahaan sustainable di bawah pengawasan ketat, penegakan regulasi dagang yang adil dan tidak memberatkan LMICs, serta peningkatan peran konsumen yang selektif dalam membedakan brand pakaian yang benar-benar sustainable dengan brand yang melakukan greenwashing semata.

Selanjutnya, dalam jurnal yang berjudul **The Ethics of Outsourcing: When Companies Fail at Responsibility**, Nelson Oly Ndubisi dan Arne Nygaard berpendapat bahwa literatur manajemen seringkali menunjukkan kemampuan *outsourcing* sebagai perangkat yang dapat menciptakan kolusi insentif, yang mengurangi oportunistik, mengeksternalisasi biaya pemantauan dan memfasilitasi organisasi rantai pasokan yang kompetitif. Namun menurut mereka, dibalik praktik *outsourcing* yang menjanjikan, perilaku etis dalam proses operasinya tidak dapat menjadi jaminan. Mereka berargumen bahwa ketika tujuan dalam proses *outsourcing* adalah untuk menghilangkan biaya transaksi atau produksi, maka etika dalam berbisnis bahkan dapat dikurangi. Dari dua contoh kasus etika *outsourcing* yang digunakan dalam jurnal ini, salah satunya terdapat kasus dari bisnis *fast fashion* yang menjadi petaka, yaitu peristiwa runtuhnya pabrik garmen Rana Plaza di Bangladesh pada tahun 2013. Dalam insiden tersebut, sikap perusahaan-perusahaan *fast fashion* terhadap keselamatan para pekerja menjadi hal yang paling disorot. Insiden tersebut menyiratkan bahwa alih-alih mendapatkan keuntungan dari biaya murah, produksi *outsourcing* secara tidak disengaja justru dapat menyebabkan kerusakan yang membutuhkan biaya sosial dan lingkungan yang lebih tinggi.

Karena itu, etika tidak boleh dialihdayakan ke manufaktur yang tidak bertanggung jawab untuk menurunkan biaya produksi. Etika di sepanjang siklus hidup produk, dari bahan mentah hingga daur ulang, merupakan bagian penting dari sebuah merek. Jadi, perusahaan multinasional yang bergerak di bidang *fashion* tidak dapat lari dari tanggung jawabnya untuk menjaga etika terhadap tenaga kerja dan lingkungan melalui strategi *outsourcing*.

Sementara itu, dalam tesisnya yang berjudul **The Impact of Fast fashion and International Law on Workers and the Environment** dan dipublikasikan pada tahun 2021, Alexandra Grace Speed memaparkan kebijakan *offshore outsourcing* Amerika Serikat sebagai cerminan dari buruknya kebijakan negara-negara maju yang justru lebih melindungi bisnis *fast fashion* daripada tenaga kerja dan lingkungan dalam lingkup internasional. Menurut pemaparannya, undang-undang federal Amerika Serikat sama sekali tidak mengatur tentang *offshore outsourcing*, tetapi praktik bisnis ini sangat dilindungi oleh North American Free Trade Agreement (NAFTA) dan beberapa perjanjian internasional lainnya. Saat ini, kontrak bisnis diregulasi oleh negara bagian, itulah sebabnya negara bagian seperti California dapat meloloskan undang-undang yang memberikan preferensi kontrak kepada perusahaan yang terus beroperasi di Amerika Serikat. Kontrak bisnis internasional tersebut memiliki kemampuan untuk memilih hukum negara mana yang berlaku, di pengadilan apa, dan bagaimana sengketa akan ditindaklanjuti. Dengan begitu, perusahaan dapat memilih sendiri sistem hukum yang lebih longgar untuk mengatur kontrak mereka. Di sisi lain, hukum di negara-negara berkembang (produsen produk *fast fashion*) relatif lemah dan sebagian besar diabaikan oleh pemilik pabrik dan pekerja, membuat perusahaan di negara maju semakin mudah melakukan *outsourcing* yang cenderung mengeksploitasi para pekerja di sana dan berdampak buruk pada lingkungan di sekitar mereka. Karena itu, perubahan signifikan di bisnis *fast fashion* hanya bisa dicapai dengan pemberlakuan undang-undang yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam jurnal yang berjudul **Are Low and Middle Income Countries Profiting From Fast fashion?** dan dipublikasi pada tahun 2021, Karan Khurana

dan S.S. Muthu berpendapat bahwa dibalik pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, sebenarnya negara-negara *low and middle income countries* (LMICs) dirugikan dari segi tenaga kerja dan lingkungan dalam praktik bisnis *fast fashion*. Dalam upaya memberantas kemiskinan, ekonomi manufaktur telah sepenuhnya mengabaikan efek samping dari produksi massal. Sektor garmen memang telah berkontribusi pada pendapatan luar negeri, devisa, pemberdayaan perempuan, total nilai ekspor dan PDB di negara-negara LMICs seperti Bangladesh dan Ethiopia. Namun, demi memperoleh biaya yang murah, industrialisasi global telah menyebabkan praktik yang *abusive* bagi pekerja maupun lingkungan. Terlepas dari upaya industri *fashion* untuk mengurangi dampak lingkungan, upaya peningkatan keberlanjutan sering kali dikalahkan oleh peningkatan konsumsi. Akibatnya, biaya murah yang ditawarkan bisnis *fast fashion* justru harus dibayar mahal dengan degradasi lingkungan dan kesehatan masyarakat yang terdampak oleh proses produksi garmen. Menurut ILO, sekitar 60% produksi garmen global terkonsentrasi di Asia yang menjadi rumah dari puluhan LMICs produsen garmen. Karena itu, dampak terberatnya terjadi di benua ini. Meskipun begitu, praktik produksi yang sustainable tidak pernah diterapkan di LMICs karena kurangnya tata kelola, kesadaran, dan korupsi yang ada di negara-negara tersebut. Warga negara yang tidak berpendidikan sama sekali tidak mengetahui akibat dari konsumsi dan produksi yang berlebihan. Selain itu, pabrik sub-kontrak (skala kecil dan menengah) sering dimiliki oleh pemilik yang tidak mendapat informasi yang sepenuhnya mengabaikan komplikasi lingkungan dari memproduksi dan menjual pakaian dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, menjadi jelas bahwa keberhasilan globalisasi sesungguhnya hanya dimiliki oleh merek-merek Barat dan vendor manufaktur mereka di negara-negara produsen. Kelas pekerja menjadi semakin miskin sementara orang kaya melanjutkan ekstraksi tanpa peduli dengan kelangsungan hidup tenaga kerja di masa depan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa industri *fashion* merupakan bisnis yang sangat berorientasi pada profit. Hal ini dapat menjadi penjelasan bagi semakin besarnya

pelaku bisnis dalam *fast fashion* yang ‘menghalalkan segala cara’ untuk dapat memenuhi permintaan konsumen, termasuk melakukan strategi *outsourcing* yang seringkali mengabaikan hak para pekerja dan risiko bisnis yang dilakukan terhadap lingkungan. Akibat minimnya penerapan regulasi serta etika dalam industri ini, perlahan namun pasti keberadaan setiap garmen yang diproduksi oleh bisnis *fast fashion* secara signifikan meningkatkan risiko penurunan kesehatan manusia dan lingkungan disekitarnya. Karena permasalahan lingkungan merupakan masalah bersama, hal yang penulis garisbawahi ialah pasti semua orang secara langsung maupun tidak langsung akan terdampak dari proses produksi industri *fashion*, namun kerusakan lingkungan terberat dirasakan secara langsung oleh tenaga kerja dan lingkungan di LMICs (termasuk Bangladesh) yang menjadi produsen utama produk-produk Ready Made Garment untuk bisnis *fast fashion*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pendahuluan yang telah penulis uraikan mengenai sekelumit dampak universal dari limbah *fast fashion* terhadap degradasi lingkungan, penulis ingin meneliti lebih dalam isu terkait dengan merumuskan masalah yang memunculkan pertanyaan:

**“Bagaimana strategi offshore outsourcing dalam bisnis fast fashion berdampak pada kerusakan lingkungan di Bangladesh?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut dampak strategi *offshore outsourcing* yang ada dalam bisnis *fast fashion* terhadap degradasi lingkungan di Bangladesh serta mengetahui peran pemerintah di balik degradasi lingkungan tersebut.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Secara akademis, peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi sivitas UPNVJ yang mengangkat penelitian terkait di masa yang akan datang.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini, peneliti berharap bahwa kesadaran para pembaca maupun masyarakat luas tentang dampak *fast fashion* terhadap lingkungan akan meningkat sehingga masyarakat dapat lebih bijaksana dalam mengonsumsi serta memilih brand pakaian yang mendukung keberlanjutan bumi ini.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang permasalahan, penelitian terdahulu, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua berisikan kerangka pemikiran yang berlandaskan dari konsep-konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian, alur penelitian, serta asumsi yang dimiliki oleh penulis.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ketiga mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta waktu dan lokasi penelitian.

#### **BAB IV: PERKEMBANGAN SEKTOR READY MADE GARMENT DALAM INDUSTRI FASHION DI BANGLADESH**

Melalui bab ini, perkembangan sektor RMG dalam industri *fashion* di Bangladesh digunakan untuk menjadi pengantar yang dapat menjelaskan dinamika bisnis *fast fashion* di negara tersebut.

#### **BAB V: DAMPAK OFFSHORE OUTSOURCING TERHADAP DEGRADASI LINGKUNGAN DI BANGLADESH**

Dalam bab keempat dipaparkan hasil penelitian mengenai strategi produksi *offshore outsourcing* yang berdampak secara signifikan terhadap kualitas lingkungan di Bangladesh.

## **BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab terakhir berisi paparan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan penulis, serta kritik dan saran terhadap fenomena yang diteliti.